



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

DKI Sinkronisasi Data Penerima Bantuan Sosial

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyinkronkan data agar warga yang berhak tetap mendapatkan bantuan sosial. Standardisasi layanan kesehatan dasar pun jadi perhatian.

JAKARTA, KOMPAS — Dua bulan lebih Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin roda pemerintahan di Ibu Kota. Selama itu pula sejumlah gebrakan dan masukan dieksekusi untuk Jakarta yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyinkronkan data bantuan sosial dengan carik dalam rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Kamis (29/12/2022). Rapat yang dipimpin Heru berlangsung pukul 09.30 hingga pukul 13.00.

Seusai rapat, Heru menyampaikannya bahwa rapat pimpinan akhir tahun 2022 membahas tugas pokok fungsi organisasi perangkat daerah hingga 2024. Salah satunya sinkronisasi data bantuan sosial dan carik antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.

Carik merupakan integrasi pelayanan kesejahteraan keluarga satu pintu melalui dasawisma atau kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam aplikasi pendataan keluarga tersebut terkumpul data keluarga seperti kependudukan, kesehatan, ekonomi, bangunan, dan lingkungan sehingga terlihat potret kesejahteraan setiap keluarga di Jakarta.

"Kami bahas ke depan supaya datanya sinkron. Hasilnya akan dipakai untuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran," ujar Heru.

Tidak tepatnya sasaran ban-

tuhan sosial (bansos) masih menjadi masalah setiap tahun di Jakarta.

Terakhir, sebanyak 150 warga miskin berunjuk rasa menuntut pemerataan bansos di kantor Kementerian Sosial dan Balai Kota Jakarta, pada Rabu (14/12). Mereka menuntut kemudahan akses warga miskin untuk mendapat bansos, termasuk akuntabilitas data penerima.

Dalam aksi itu Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan melaporkan, setidaknya 4.700 keluarga miskin pemegang kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta belum mendapat bansos meskipun sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data dihimpun dari 20 kelurahan, antara lain Kelurahan Kebon Jeruk, Cengkareng, dan Kaliyari di Jakarta Barat; Pulo Gebang, Cililitan, dan Ciracas di Jakarta Timur; serta Penjaringan dan Warakas di Jakarta Utara.

Dalam rapat tersebut Heru juga meminta pengecekan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wilayah DKI Jakarta. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memilah peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi tanggungan provinsi dan pemerintah pusat.

Heru berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang prima untuk seluruh warga dengan menyinkronkan data kepesertaan sambil memperluas cakupan dan standardisasi layanan di rumah sakit daerah

penyangga Jakarta. Dengan begitu bisa menekan potensi penumpukan layanan di rumah sakit umum daerah tertentu.

"Standardisasi layanan rumah sakit harus disamakan, minimal di perbatasan wilayah Jakarta. Tujuannya supaya cakupan, kualitas, ataupun kuantitas layanan dapat merata," katanya.

Masalah pokok

Sejak dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober, Heru langsung tancap gas mengumpulkan organisasi perangkat daerah, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga, sowan ke DPRD DKI, dan meninjau berbagai proyek Pemprov DKI.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, Heru harus terus didorong untuk fokus menyelesaikan masalah pokok di Jakarta. Masalah pertama ialah banjir kiriman dari hulu, banjir lokal karena cuaca ekstrem, dan banjir rob.

"Caranya fokus mengeksekusi normalisasi sungai, pembangunan tanggul laut, dan perbaikan drainase kota. Harus ada keberanian mengeksekusi program yang bertahun-tahun tak berjalan," ucap Gembong.

Pemprov DKI akan membebaskan lahan tersisa untuk sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mulai awal 2023. Penyelesaian infrastruktur pengendalian banjir ini sudah tertunda lima tahun terakhir.

Lahan untuk sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur seluas 1.600 meter persegi dari total lahan 3.600 meter persegi. Lahan milik Pemprov DKI itu harus dibebaskan dari setidaknya 70 gubuk liar agar proyek bisa berlanjut.

Masalah kedua ialah cakupan pelayanan air bersih. PAM Jaya hingga Oktober 2022 mencatat cakupan layanan sebesar 65,85 persen yang terdiri dari 913.913 pelanggan, panjang pipa 12.075 kilometer, kapasitas produksi 20.082 liter per detik, dan jumlah kehilangan air atau *non-revenue water* 46,47 persen.

Gembong menambahkan, transisi pelayanan air bersih dari swasta ke Pemprov DKI yang ditargetkan pada 1 Februari 2023 harus terus dikawal untuk kedaulatan air bersih warga. Bahkan, Fraksi PDI-P DPRD DKI sempat memprotes kerja sama PAM Jaya dengan pihak ketiga, PT Moya Indonesia.

"Rupanya kerja sama soal penyediaan air bersih bukan distribusi yang tetap menjadi tanggung jawab pemprov," katanya.

Salah satu upaya PAM Jaya untuk mengatasi krisis air bersih di utara Jakarta ialah membangun reservoir air komunal di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Reservoir air komunal juga akan dibangun di Taman Sari, Krendang, Tambora, Kalideres Duri Kosambi, Muara Baru RW 017 Penjaringan, Marunda Pulo, Kali Baru, dan PPK Kemayoran-Kebon Kosong yang mengalami

krisis air bersih dengan target pemenuhan Maret 2023. PAM Jaya masih berupaya merealisasikan pemenuhan 100 persen kebutuhan air minum perpipaan bagi warga DKI tahun 2030. Salah satunya membangun perpipaan sepanjang 4.000 kilometer bertahap tahun 2023-2024.

Masalah ketiga, belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan. Fraksi PDI-P DPRD DKI mencatat masih ada 15 kelurahan belum mempunyai puskesmas dari total 267 kelurahan se-Jakarta.

Menurut Gembong, jika memungkinkan, setiap kelurahan mempunyai puskesmas.

Evaluasi APBD

Selain masalah prioritas, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta masih harus mengevaluasi APBD 2023. Evaluasi itu sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/35913/Kepada yang ditandatangani pada 26 Desember 2022.

Dalam surat itu Kementerian Dalam Negeri meminta evaluasi paling lambat tujuh hari. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Bambang Kusumanto meminta segera ada tindak lanjut agar dana transfer umum dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari Kementerian Keuangan tidak ditunda atau dipotong. "Jumlahnya 24 persen (Rp 18,4 triliun) dari pendapatan daerah," ujar Bambang Kosong yang mengalami